

**HUBUNGAN ANTARA DANA ALOKASI UMUM, BELANJA  
MODAL, PENDAPATAN ASLI DAERAH DAN PENDAPATAN  
PER KAPITA**

(studi empiris pada pemerintah daerah kabupaten dan kota se Jawa  
Tengah periode 2006-2007)



**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Syarat-syarat Guna Memperoleh  
Gelar Sarjana Ekonomi Jurusan Akuntansi pada Fakultas Ekonomi  
Universitas Muhammadiyah Surakarta

Oleh :

**HENI DIANNING UMIYASARI**  
**B 200 050 100**

FAKULTAS EKONOMI  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA

2010

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Kebijakan desentralisasi fiskal Indonesia mulai diberlakukan secara efektif per Januari tahun 2001. Kebijakan terkait tertuang dalam UU No. 22 Tahun 1999 tentang pemerintahan daerah dan UU No. 25 tahun 1999 tentang perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. UU ini dalam perkembangannya diperbarui dengan dikeluarkannya UU No. 32 tahun 2004 dan UU No. 33 Tahun 2004.

Dengan adanya desentralisasi fiskal ini maka telah menyebabkan perubahan yang mendasar mengenai perubahan pengaturan pusat dan daerah, khususnya dalam bidang administrasi pemerintahan maupun dalam hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah yang dikenal sebagai era otonomi daerah. Artinya daerah diberikan kewenangan yang lebih besar untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Tujuannya antara lain adalah untuk lebih mendekatkan dan meningkatkan pelayanan pemerintah kepada publik. Peningkatan pelayanan di sektor publik ini di harapkan dapat meningkatkan daya tarik bagi investor untuk membuka usaha di daerah. Sehingga pendapatan pemerintah daerah semakin meningkat.

Dengan adanya peningkatan pendapatan pemerintah daerah ini maka anggaran daerah yang berfokus pada pelaksanaan pelayanan publik dapat mendorong timbulnya inovasi. Anggaran daerah merupakan rencana keuangan yang menjadi dasar pelaksanaan pelayanan publik. Di Indonesia dokumen

anggaran daerah disebut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), baik untuk propinsi maupun kabupaten dan kota. Dengan adanya Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) ini dapat memudahkan masyarakat untuk memantau dan mengontrol penggunaan dana, apakah telah berlangsung secara efektif.

Akan tetapi pelaksanaan otonomi daerah ini dapat menimbulkan masalah baru bagi pemerintah pusat terkait dengan adanya perbedaan persiapan daerah. Adi (2006) menunjukkan paling tidak terdapat dua hal penting yang menyebabkan perbedaan ini, yaitu pertama adanya perbedaan kapasitas fiskal antar daerah dan kedua adanya perbedaan kemampuan manajerial dalam pengelolaan berbagai sumber daya yang dimiliki oleh daerah, baik itu sumber daya alam, sumber daya manusia dan dana. Untuk mengatasi adanya perbedaan fiskal antara daerah maka pemerintah memberikan dana perimbangan yang terdiri dari Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK). DAK itu sendiri di golongan ke dalam bentuk *conditional transfer* atau biasa disebut dengan transfer bersyarat.

Pemberian dana perimbangan ditujukan untuk mengurangi adanya disparitas fiskal vertikal (antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah) dan juga untuk membantu daerah dalam membiayai kewenangannya. Dalam beberapa tahun berjalan, proporsi DAU terhadap penerimaan daerah masih yang tertinggi dibanding dengan penerimaan daerah yang lain, termasuk Pendapatan Asli Daerah (Adi, 2006). Hal ini menunjukkan masih tingginya ketergantungan pemerintah daerah terhadap pasokan dana dari pemerintah pusat. DAU merupakan dana hibah murni (*grants*) yang kewenangan

penggunaannya diserahkan kepada pemerintah daerah penerima, sehingga dapat disimpulkan bahwa DAU merupakan sarana untuk mengatasi ketimpangan fiskal antar daerah dan disisi lain merupakan sumber pembiayaan daerah. Hal ini berarti pemberian DAU lebih di prioritaskan kepada daerah yang mempunyai kapasitas fiskal rendah.

Dalam penciptaan kemandirian daerah, pemerintah harus beradaptasi dan berupaya meningkatkan mutu pelayanan publik dan perbaikan di berbagai sektor yang berpotensi untuk dikembangkan menjadi sumber PAD. PAD memiliki peranan yang sangat penting dalam perekonomian daerah. Daerah yang memiliki tingkat pertumbuhan PAD yang positif mempunyai kemungkinan untuk memiliki pendapatan per kapita yang lebih baik (Harianto dan Adi, 2007).

Dalam upaya peningkatan kemandirian daerah, pemerintah daerah juga dituntut memberikan proporsi belanja modal yang lebih besar untuk pembangunan pada sektor-sektor yang produktif di daerah. Kuncoro (2004) juga menyebutkan bahwa PAD hanya mampu membiayai belanja pemerintah daerah yang tinggi sebesar 20%. Kenyataan ini tidak sejalan dengan tujuan otonomi daerah yaitu mendirikan daerah dengan potensi-potensi yang dimilikinya. Maimunah (2006) membuktikan adanya perilaku asimetris yang ditunjukkan oleh pengaruh DAU terhadap belanja daerah dan PAD. Besarnya proporsi DAU berpengaruh terhadap belanja daerah, tetapi besarnya DAU tidak berpengaruh terhadap belanja daerah. Hal ini menunjukkan bahwa transfer pemerintah khususnya DAU begitu dominan dalam membiayai belanja pemerintah daerah. Dalam jangka panjang, ketergantungan ini

seharusnya dikurangi karena berdampak negatif terhadap kemandirian daerah. Berbagai investasi yang dilakukan pemerintah daerah diharapkan memberikan hasil positif yang tercermin dalam peningkatan PAD.

Pergeseran komposisi belanja merupakan upaya logis yang dilakukan pemerintah daerah setempat dalam rangka meningkatkan tingkat kepercayaan publik. Pergeseran ini ditujukan untuk peningkatan investasi modal dalam bentuk aset tetap yakni peralatan, bangunan, infrastruktur dan harta tetap lainnya. Semakin tinggi tingkat investasi modal diharapkan mampu meningkatkan kualitas layanan publik, karena aset tetap yang dimiliki sebagai akibat adanya belanja modal merupakan prasyarat utama dalam memberikan pelayanan publik oleh pemerintah daerah. Alokasi belanja modal ini didasarkan pada kebutuhan daerah akan sarana dan prasarana, baik untuk kelancaran pelaksanaan tugas pemerintah maupun untuk kualitas pelayanan publik, pemerintah daerah seharusnya mengubah komposisi belanjanya karena mungkin selama ini belanja daerah digunakan untuk belanja rutin yang relatif kurang produktif.

Pembangunan sarana dan prasarana daerah berpengaruh pada pertumbuhan ekonomi (Kuncoro, 2004 dalam Harianto dan Adi, 2007). Tingkat pertumbuhan ekonomi menjadi salah satu tujuan penting pemerintah daerah maupun pemerintah pusat. Upaya untuk meningkatkan pendapatan asli daerah tidak akan memberikan arti apabila tidak diikuti dengan peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah. Secara tradisional, pertumbuhan ekonomi ditujukan untuk peningkatan yang berkelanjutan Produk Domestik Regional Bruto/PDRB (Saragih, 2003 dalam Darwanto dan Yustikasari, 2007).

Indikator pendapatan per kapita dapat digunakan sebagai alat ukur pertumbuhan ekonomi (Kuncoro, 2004). Indikator ini secara simultan menunjukkan apakah pertumbuhan ekonomi yang terjadi mampu meningkatkan kesejahteraan seiring dengan semakin cepatnya laju pertumbuhan penduduk.

Dengan ditambahnya infrastruktur dan perbaikan infrastruktur yang ada oleh pemerintah daerah, diharapkan akan memacu pertumbuhan ekonomi di daerah yang akan dapat merangsang meningkatnya pendapatan penduduk di daerah yang bersangkutan, seiring dengan meningkatnya pendapatan penduduk akan berdampak pada meningkatnya pendapatan per kapita. Pada gilirannya, hal ini dapat meningkatkan pendapatan masyarakat secara umum yang tercermin dalam pendapatan per kapita seperti dalam penelitian Adi (2006) yang membuktikan bahwa belanja modal mempunyai pengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi. Alokasi belanja modal untuk pengembangan infrastruktur penunjang perekonomian, akan mendorong tingkat produktivitas penduduk yang tercermin dalam pendapatan per kapita.

Berdasarkan latar belakang yang ada, penelitian ini dilakukan dengan mengambil judul sebagai berikut “Hubungan Antara Dana Alokasi Umum, Belanja Modal, Pendapatan Asli Daerah dan Pendapatan Per Kapita (studi empiris pada pemerintah daerah kabupaten/kota se Jawa Tengah periode 2006-2007).

## **B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan uraian sebelumnya mengenai latar belakang masalah, maka masalah yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Modal?
2. Bagaimana pengaruh Belanja Modal terhadap Pendapatan Asli Daerah?
3. Bagaimana pengaruh Belanja Modal terhadap Pendapatan per Kapita?
4. Bagaimana pengaruh Pendapatan Asli Daerah Terhadap Pendapatan per Kapita?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan perumusan masalah tersebut diatas maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah untuk memberikan bukti empiris adanya suatu hubungan antara Dana Alokasi Umum, Belanja Modal, Pendapatan Asli Daerah dan Pendapatan per Kapita dengan studi empiris pada pemerintah daerah kabupaten/kota se Jawa Tengah selama dua tahun berturut-turut dari tahun 2006 sampai dengan tahun 2007.

### **D. Manfaat Penelitian**

Dalam penelitian ini, penulis berharap penelitian yang dilakukan dapat bermanfaat bagi:

1. Pemerintah daerah kabupaten/kota di Jawa Tengah

Hasil-hasil analisis yang didapatkan dalam penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan untuk meningkatkan kinerja pemerintah daerah dalam hal pengelolaan potensi-potensi pendapatan asli daerah sehingga dapat mendorong kabupaten maupun kota di Jawa Tengah ke arah tercapainya visi, misi dan tujuan yang lebih baik.

## 2. Bagi Penulis

Menambah wawasan dan pemahaman mengenai adanya hubungan antara Dana Alokasi Umum, Belanja Modal, Pendapatan Asli Daerah dan Pendapatan per Kapita dengan studi empiris pada pemerintah daerah kabupaten/kota di Jawa Tengah.

### **E. Sistematika Penulisan**

Untuk memperoleh gambaran singkat, penelitian ini dibagi dalam lima bab yang secara garis besarnya disusun sebagai berikut:

#### **BAB I : PENDAHULUAN**

Bab ini berisi tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

#### **BAB II : TINJAUAN PUSTAKA**

Bab ini berisi tentang teori-teori yang sedang di kaji antara lain pengertian dan pembahasan mengenai Dana Alokasi Umum, Belanja Modal, Pendapatan Asli Daerah dan Pendapatan per Kapita.

#### **BAB III : METODE PENELITIAN**

Bab ini berisi tentang jenis penelitian, obyek penelitian, metode pengumpulan data dan metode analisis data.

#### **BAB IV : ANALISIS DATA**

Bab ini berisi tentang deskripsi data kabupaten/kota yang hendak diteliti dan analisis data yang membahas mengenai



hubungan antara Dana Alokasi Umum, Belanja Modal, Pendapatan Asli Daerah dan Pendapatan per Kapita.

**BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN**

Bab ini berisi kesimpulan yang didapat dari masalah-masalah yang sedang ditulis serta saran-saran kepada pemerintah daerah Se Jawa Tengah untuk memberikan bukti-bukti empiris mengenai hubungan antara Dana Alokasi Umum, Belanja Modal, Pendapatan Asli Daerah, dan Pendapatan per Kapita.